

Pengaruh Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Tengah

Rima Harati

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangkaraya, Indonesia

*Korespondensi: rimaharti74@gmail.com

Received: 16-06-2026

Revised: 27-08-2026

Accepted: 07-09-2026

Abstract

This study aims to analyze the effect of Minimum Wage and Human Development Index (HDI) on income inequality in Central Kalimantan Province during the period 2013–2025. The study uses a quantitative approach with multiple linear regression methods to examine the relationship between the minimum wage and HDI variables on the level of income inequality. Based on the results of the analysis, it was found that Minimum Wage and Human Development Index (HDI) had a negative and significant effect on income inequality in Central Kalimantan Province during the period 2013–2025. This means that increasing the minimum wage and improving the quality of human development tend to be able to reduce the level of income inequality. Simultaneously, both variables were also proven to have a significant effect on income inequality, with a coefficient of determination (R^2) value of 0.749, indicating that 74.9% of the variation in income inequality can be explained by the model, while the rest is influenced by other factors outside the study. This research provides benefits for public policy development, particularly as a consideration for local governments in establishing employment policies, improving the quality of education, health services, and poverty alleviation programs that focus on equitable distribution of public welfare.

Keywords: Minimum Wage, Human Development Index, Income Inequality

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2013–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel upah minimum dan IPM terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2013–2025. Artinya, peningkatan upah minimum dan peningkatan kualitas pembangunan manusia cenderung mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,749 yang menunjukkan bahwa 74,9% variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat bagi perumusan kebijakan publik, khususnya sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Ketimpangan Pendapatan

PENDAHULUAN

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk melindungi pekerja sekaligus meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Secara teoritis, kenaikan UMP diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pekerja sehingga daya beli masyarakat dan kualitas hidupnya juga mengalami peningkatan (Borjas, 2020). Fenomena yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa peningkatan UMP sering kali menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah (Soekapdjo & Oktavia, 2021). Namun demikian, dampak kenaikan UMP terhadap ketimpangan pendapatan tidak selalu menunjukkan hasil yang sama. Apabila kenaikan upah dapat dirasakan secara merata oleh pekerja di berbagai sektor ekonomi, maka kesenjangan pendapatan cenderung menurun (Islamy *et al.*, 2026). Sebaliknya, apabila manfaat kenaikan upah lebih banyak dinikmati oleh pekerja sektor formal, sementara sektor informal tidak mengalami peningkatan pendapatan yang sebanding, maka kondisi tersebut berpotensi memperlebar disparitas pendapatan antar kelompok Masyarakat (World Bank, 2022).

Selain kebijakan upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. IPM menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (UNDP, 2024). Oleh karena itu, nilai IPM sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah maupun negara. Tidak hanya sebagai indikator kesejahteraan, IPM juga berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pemerintah dalam merancang dan mengukur keberhasilan program pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sehingga peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik juga meningkat (Todaro & Smith, 2021).

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Tengah, fenomena peningkatan UMP dan perkembangan IPM dari tahun ke tahun menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena keduanya berpotensi memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan. Meskipun berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disparitas pendapatan masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh UMP dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan (BPS Kalimantan Tengah, 2025).

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Gini Ratio pada tahun 2013 tercatat sebesar 0,345 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 0,336. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan masyarakat, meskipun tingkat ketimpangan masih tergolong sedang dan

memerlukan perhatian berkelanjutan (BPS Kalimantan Tengah, 2020). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan tingkat upah, akses pendidikan, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta karakteristik geografis wilayah (Kuznets, 1955).

Di Provinsi Kalimantan Tengah, Upah Minimum Provinsi (UMP) mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2013–2025. Kenaikan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan menyesuaikan tingkat upah dengan perkembangan kondisi ekonomi. Meskipun demikian, peningkatan UMP yang terjadi setiap tahun belum tentu secara langsung mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota. Perbedaan struktur ekonomi, tingkat produktivitas, serta karakteristik pasar tenaga kerja di masing-masing wilayah dapat menyebabkan dampak kebijakan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan menjadi berbeda-beda (Amali & Syafri, 2023; Soekapdjo & Oktavia, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana kebijakan upah minimum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat disparitas pendapatan di Kalimantan Tengah (BPS Kalimantan Tengah, 2025).

Selain perkembangan upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Tengah juga menunjukkan kecenderungan meningkat sepanjang tahun 2013–2025 berdasarkan data statistik daerah. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari meningkatnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta standar hidup yang lebih layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kalimantan Tengah terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu (BPS Kalimantan Tengah, 2025). Namun demikian, peningkatan IPM tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis hubungan antara perkembangan IPM dan tingkat ketimpangan pendapatan guna mengetahui apakah peningkatan kualitas sumber daya manusia telah mampu mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata (Setiawan & Hakim, 2013; Nursahid *et al.*, 2018). Gambaran mengenai perkembangan Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah selama periode penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan

Tahun	Upah Minimum	Indeks Pembangunan Manusia	Ketimpangan Pendapatan
2013	1553127	67.41	0.345
2014	1723970	67.77	0.352
2015	1896367	68.53	0.326
2016	2057558	69.13	0.330
2017	2227307	69.79	0.343
2018	2421305	70.42	0.342
2019	2663436	70.91	0.336

2020	2903144	71.05	0.329
2021	2903144	72.81	0.323
2022	2922516	73.17	0.319
2023	3181013	73.73	0.317
2024	3261616	74.28	0.301
2025	3473621	74.86	0.292

Sumber : kalteng.bps.go.id, (2025)

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Rumusan masalah ini disusun untuk mengkaji apakah peningkatan upah minimum dan kualitas pembangunan manusia mampu berkontribusi dalam mengurangi disparitas pendapatan yang terjadi di Kalimantan Tengah selama periode penelitian. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara kebijakan ketenagakerjaan, pembangunan manusia, dan tingkat pemerataan pendapatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Upah Minimum

Upah merupakan sumber utama penghasilan pekerja yang diterima sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan, termasuk berbagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Dalam teori pasar tenaga kerja, tingkat upah ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga tercapai keseimbangan pasar (Borjas, 2020). Selanjutnya, dalam teori ekonomi neoklasik dijelaskan bahwa pada pasar persaingan sempurna, upah ditentukan berdasarkan nilai produk marjinal tenaga kerja (marginal revenue product of labor), yaitu kontribusi tambahan tenaga kerja terhadap output yang dihasilkan (Mankiw, 2021). Namun demikian, ketika pemerintah menetapkan upah minimum sebagai batas bawah tingkat upah, kebijakan tersebut dapat memengaruhi mekanisme pasar tenaga kerja. Penetapan upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja agar memperoleh pendapatan yang layak dan mengurangi eksploitasi tenaga kerja, tetapi pada kondisi tertentu juga dapat memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja karena meningkatnya biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan (Borjas, 2020).

Salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah kebijakan upah minimum. Secara teoritis, upah minimum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena meningkatkan pendapatan kelompok pekerja berupah rendah sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata (Soekapdjo & Oktavia, 2021). Akan tetapi, implementasi kebijakan upah minimum perlu dilakukan secara hati-hati. Apabila tingkat upah minimum ditetapkan terlalu rendah, maka tujuan untuk mencapai standar

hidup layak bagi pekerja sulit terwujud. Sebaliknya, apabila upah minimum ditetapkan terlalu tinggi dan melebihi kemampuan dunia usaha, maka dapat menimbulkan trade-off berupa berkurangnya permintaan tenaga kerja, meningkatnya pengangguran, atau pergeseran tenaga kerja ke sektor informal (Amali & Syafri, 2023). Oleh karena itu, kebijakan upah minimum harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi agar mampu mendukung pemerataan pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (BPS, 2024). Ketika IPM meningkat, indikator-indikator seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita juga mengalami perbaikan. Kondisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan karena masyarakat yang sehat, terdidik, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi cenderung memiliki produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi (UNDP, 2024). Sebaliknya, rendahnya IPM sering kali berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi menghambat mobilitas sosial serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi salah satu strategi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Setiawan & Hakim, 2013).

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketika hasil pembangunan ekonomi belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga terjadi perbedaan distribusi pendapatan antar individu maupun kelompok masyarakat (Todaro & Smith, 2021). Ketimpangan distribusi pendapatan muncul ketika akses terhadap hasil pembangunan, kesempatan ekonomi, dan faktor-faktor produksi tidak tersebar secara adil di antara anggota masyarakat. Menurut Kuznets, (1955) ketimpangan pendapatan mencerminkan perbedaan dalam pembagian pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok sosial sebagai akibat dari perbedaan kepemilikan sumber daya, modal, pendidikan, dan kesempatan kerja. Ketimpangan pendapatan antar daerah juga dapat terjadi karena adanya perbedaan komposisi penduduk, potensi sumber daya alam, tingkat pembangunan ekonomi, serta karakteristik sosial dan geografis masing-masing wilayah (Sjafrizal, 2018). Perbedaan tersebut menyebabkan adanya kesenjangan pendapatan antara daerah yang telah berkembang dengan daerah yang masih tertinggal (Arsyad, 2016).

Beberapa indikator yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara lain Indeks Gini (*Gini Ratio*), Indeks Theil, dan kriteria ketimpangan

menurut Bank Dunia. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah Indeks Gini. Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan yang paling banyak digunakan karena mampu menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara agregat dalam suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berada pada rentang 0 sampai 1, di mana nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna atau sangat tinggi (Badan Pusat Statistik, 2024; World Bank, 2022). Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka sehingga dapat diolah dan dianalisis secara statistik. Menurut Sugiyono, (2018) data kuantitatif adalah data yang berbentuk numerik atau data kualitatif yang telah dikonversi ke dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan meliputi data Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2013–2025. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah serta sumber-sumber pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menjelaskan pengaruh Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Tengah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Selain itu, regresi linier berganda dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas, serta menguji apakah pengaruh yang diberikan terhadap variabel terikat bersifat signifikan atau tidak. Dengan demikian, analisis ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia dalam memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Kalimantan Tengah. Adapun model persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Ketimpangan Pendapatan

X₁ = Upah Minimum

X₂ = Indeks Pembangunan Manusia

β₀ = Konstanta

β₁, β₂ = Koefisien regresi

ε = Error term

1. Pengujian hipotesis parsial (uji t)

2. Uji T
3. Uji Koefisien Determinan (R²)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi berganda diperoleh hasil yang disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji T
Coefficients^a

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.933	.325		2.874	.017
	X1	-2.299E-8	.000	-.823	-4.814	.001
	X2	-.006	.001	-.861	-5.607	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 25, (2026)

Dari hasil analisis diatas diperoleh bahwa variabel Upah minimum (X1) dan Indeks pembangunan manusia mempunyai sig < sig 0.05, yang menjelaskan bahwa kedua variabel X1 dan X2 mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Di Kalimantan Tengah.

Pengujian (uji t)

a. Upah minimum (X1)

Hasil uji tersebut memperlihatkan bahwa variabel Upah minimum memperoleh t-hitung -4.814 > 2,228 t-tabel dimana sig. 0.001 < 0,05, artinya Upah minimum mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kepada Ketimpangan Pendapatan (KP) Di Kalimantan Tengah selama tahun 2013-2025.

Indeks pembangunan manusia (X2)

Hasil uji tersebut memperlihatkan bahwa variabel Indeks pembangunan manusia memperoleh t-hitung -5.607 > 2,228 t-tabel dengan sig. 0.000 < 0,05 yang artinya Indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh negative signifikan kepada Ketimpangan Pendapatan (KP) di Kalimantan Tengah selama tahun 2013-2025.

b. Uji F (Simultan)

Tabel 3. Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.003	2	.001	14.947	.001 ^b
	Residual	.001	10	.000		
	Total	.004	12			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Output SPSS 25, (2026)

Hasil uji simultan (Uji F) sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel ANOVA menghasilkan nilai F hitung sebesar $14.947 > 3.89$ F tabel dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar $0,001 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel upah minimum dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Tengah. Dengan demikian, model regresi yang dibangun dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel Upah minimum dan IPM di Kalimantan tengah. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai Adjusted R-Square. Nilai Adjusted R-Square semakin mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut disajikan hasil perhitungan koefisien determinasi (R²) menggunakan bantuan aplikasi SPSS 25.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.866a	.749	.699	.009506

a. Predictors: (Constant), X₂, X₁

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 25, (2026)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R²), diketahui bahwa nilai R-Square sebesar 0,749. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perubahan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 74,9%. Sementara itu, sisanya sebesar 25,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Upah Minimum dan IPM memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan kondisi ketimpangan pendapatan di Kalimantan Tengah selama periode penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel Upah Minimum terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar -4,814 yang lebih besar daripada t-tabel sebesar 2,228 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum cenderung diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan di suatu kabupaten/kota, semakin besar

peluang terjadinya pemerataan pendapatan di wilayah tersebut. Sebaliknya, apabila upah minimum relatif rendah, maka kesenjangan pendapatan berpotensi meningkat.

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum dapat berperan sebagai instrumen dalam mengurangi disparitas pendapatan melalui peningkatan kesejahteraan kelompok pekerja berpendapatan rendah. Ketika upah minimum mengalami kenaikan, daya beli masyarakat meningkat sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Namun demikian, besaran upah minimum di setiap daerah tidak sama karena ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti kebutuhan hidup layak, tingkat inflasi, kondisi ekonomi daerah, dan kemampuan dunia usaha (Amali & Syafri, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Soekapdjo & Oktavia, (2021) yang menemukan bahwa peningkatan upah minimum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan melalui peningkatan pendapatan kelompok pekerja berupah rendah. Temuan ini juga didukung oleh Amali & Syafri, (2023) yang menunjukkan bahwa upah minimum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan upah minimum memiliki peran strategis dalam menekan ketimpangan pendapatan dan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di Kalimantan Tengah.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t*-hitung sebesar -5,607 yang lebih besar daripada *t*-tabel sebesar 2,228 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkontribusi terhadap penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, maka semakin rendah tingkat kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Sebaliknya, rendahnya kualitas pembangunan manusia berpotensi meningkatkan disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek pendidikan dan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik umumnya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan berpenghasilan tinggi. Demikian pula, kondisi kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (Setiawan & Hakim, 2013). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Makipantung *et al.*, (2023) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, penelitian Irawan *et al.*, (2024) juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berkontribusi terhadap menurunnya ketimpangan pendapatan antarwilayah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori pembangunan manusia yang menyatakan bahwa investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berperan dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2013–2025. Artinya, peningkatan upah minimum dan peningkatan kualitas pembangunan manusia cenderung mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,749 yang menunjukkan bahwa 74,9% variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian hanya menggunakan dua variabel utama sehingga belum sepenuhnya menggambarkan seluruh faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, investasi, maupun kebijakan fiskal daerah. Selain itu, keterbatasan data yang hanya mencakup periode 2013–2025 serta penggunaan data tingkat provinsi menyebabkan analisis belum dapat menggambarkan kondisi ketimpangan secara lebih rinci antar kabupaten/kota. Penggunaan metode regresi linier berganda juga membatasi analisis pada hubungan linier tanpa mempertimbangkan dinamika jangka panjang yang mungkin terjadi.

Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas kebijakan upah minimum serta memperkuat pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja sebagai upaya menekan ketimpangan pendapatan. Selain itu, pemerataan pembangunan antarwilayah perlu menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang lebih beragam serta menggunakan pendekatan data panel atau metode analisis yang lebih kompleks agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Amali, F. N., & Syafri. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan 33 provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 815–820. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15424>

- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi pembangunan* (Edisi ke-5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. (2020). *Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020*. Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. (2025). *Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025*. Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Borjas, G. J. (2020). *Labor Economics* (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Card, D., & Krueger, A. B. (1995). *Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage*. Princeton: Princeton University Press.
- Irawan, D., Wijimulawiani, B. S., & Hak, M. B. (2024). Analisis pengaruh populasi, pertumbuhan ekonomi, IPM, investasi dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019–2023. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(3), 623–633. <https://doi.org/10.36985/y23kbn87>
- Islamy, S. N., Faisol, F., & Jalil, S. A. (2026). Analisis Multiplier Effect Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 675-681. <https://doi.org/10.63822/rvt8bs91>
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Makipantung, R. O., Walewangko, E. N., & Niode, A. O. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 85–96.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Nursahid, E., Priyagus, & Mintarti, S. (2018). Analisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 3(1). <https://doi.org/10.29264/jiem.v3i1.2335>
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26. <https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1373>
- Sjafrizal. (2018). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi* (Edisi revisi). Depok: Rajawali Pers.
- Soekapdjo, S., & Oktavia, D. (2021). Pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 21(2), 135–149.
- Soekapdjo, S., & Oktavia, D. (2021). Pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 21(2), 135–149.

- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-28). Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). Boston: Pearson Education.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2024). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock*. New York: UNDP.
- World Bank. (2022). *Indonesia Poverty Assessment: Pathways toward Economic Security*. Washington DC: World Bank.